

**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2019**

LAPORAN KINERJA

LKj

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018. LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013.-2018).

LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. 12 indikator kinerja dari 3 sasaran, sebanyak 7 indikator dinyatakan "berhasil" karena capaiannya di atas 100% dari target, 5 indikator dinyatakan tidak berhasil karena capaiannya kurang dari target yang ditetapkan. Indikator yang tidak berhasil adalah Angka Melek Huruf, Kualifikasi Pendidikan tenaga kependidikan, Jumlah anak yang mendapatkan Bantuan pendidikan, presentase angka kelulusan peserta didik dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 ini, dapat

menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sinjai, 08 Februari 2019
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sinjai,



dr. ANDI SURYANTO ASAPA

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19600502 199803 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Gambaran Umum Organisasi	2
4. Isu-isu Strategis	3
5. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.....	4
6. Komposisi SDM Organisasi.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
1. Rencana Strategis	9
2. Rencana Kinerja	14
3. Indikator Kinerja Utama.....	18
4. Rencana Anggaran Tahun 2018	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	23
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.	62
B. Langkah Perbaikan Kinerja.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat **kendali** untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses **evaluasi** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yakni membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan, maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders*, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif.

Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendorong semua lapisan masyarakat yang terkait dengan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagai konseptor, pengambil kebijakan, pelaksana. untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Peningkatan kualitas dan peran serta pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dimaksudkan mencari pemecahan solusi antisipatif terhadap kebutuhan daerah untuk masa 5 tahun mendatang. Dan pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun sebagai acuan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, dan juga merupakan upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya lainnya (swasta) untuk terlibat di dalam

pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai perlu memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip *good governance* yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Prinsip *good governance* ini telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.

Dengan demikian, kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai *good governance* secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

1.4. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam Renja tahun 2017 adalah :

1. Peningkatan layanan akses dan kualitas pendidikan. telah dilakukan usaha perluasan dan perbaikan melalui kebijakan pendidikan gratis yang diimplementasikan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi akselerasi kinerja yang menyamai kinerja nasional
2. porsi penduduk dengan kualifikasi luaran pendidikan tinggi baru sekitar 1,3%, masih jauh dari kondisi ideal. Kualitas lulusan SD hingga SLTA sudah mengalami peningkatan dilihat dari tingkat kelulusan ujian nasional, namun demikian perlu diperhatikan keberlanjutan prestasi tersebut khususnya terkait dengan kinerja guru yang telah tersertifikasi
3. Masih terbatasnya penyediaan berbagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan baik formal dan non formal
4. Belum sempurnanya kurikulum dan sistem pembelajaran
5. Belum maksimalnya penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan
6. Belum efektifnya dan efisiensi proses belajar mengajar pada satuan pendidikan
7. Masih lemahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja sekolah
8. Masih terbatasnya pengembangan sekolah dan kelas unggulan / sekolah unggulan
9. Belum terlaksananya pendidikan berbasis masyarakat dan berorientasi pada keterampilan hidup
10. Belum maksimalnya penyelenggaraan kegiatan kelompok musyawarah tenaga pendidik pada setiap gugus satuan pendidikan
11. Belum maksimalnya pelaksanaan akreditasi sekolah
12. Belum semuanya tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan insentif subsidi maupun reward bagi PTK yang berkinerja baik
13. Belum maksimalnya pemberdayaan personil dan lembaga pendidikan
14. Belum maksimalnya pelaksanaan supervisi pendidikan

1.5. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57 tahun 2016.

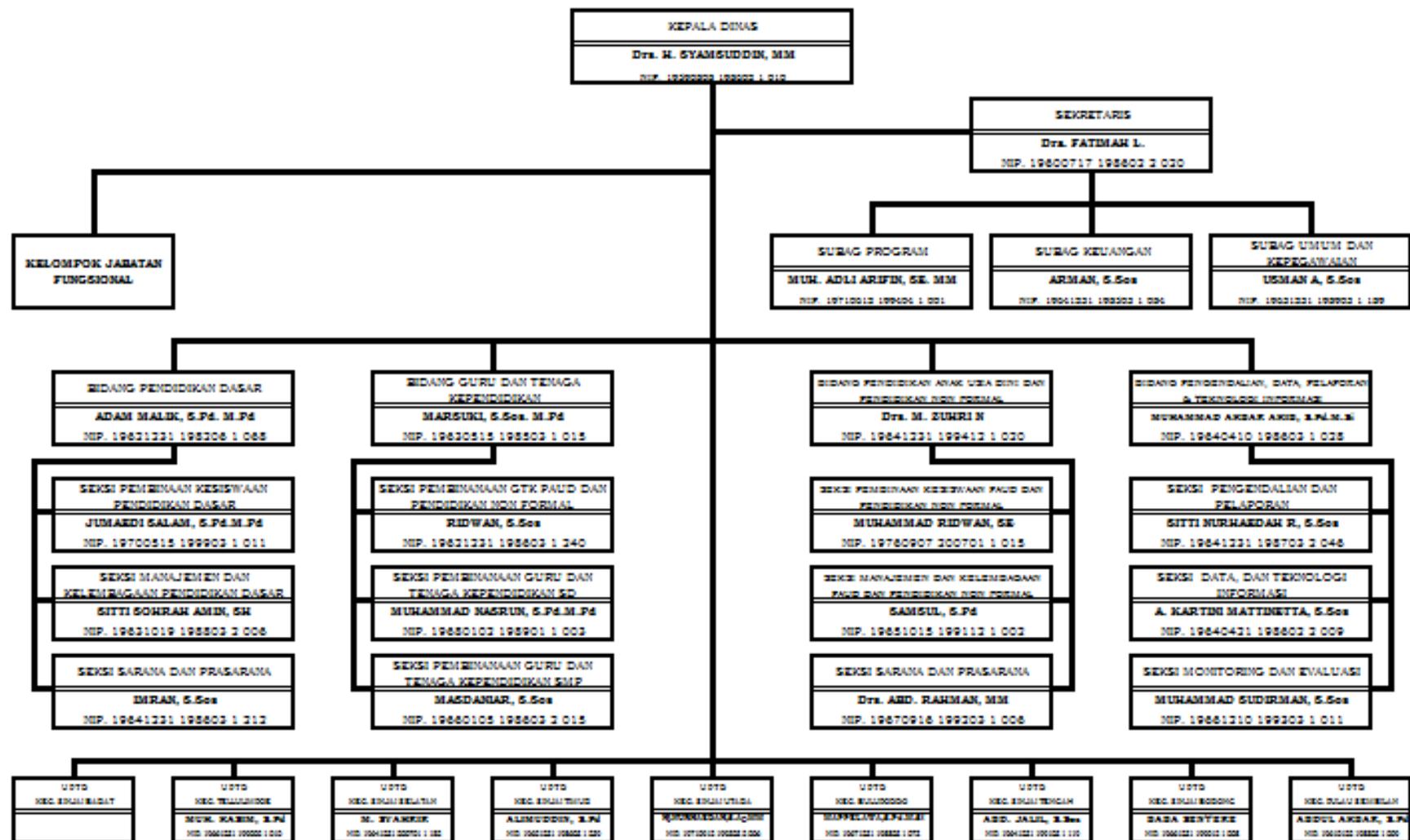
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh satu Sekretariat yang menangani Administrasi dan empat Bidang yang melaksanakan teknis pendidikan, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan dinas yang meliputi:
 - a. Penyusunan Program dan Laporan Kinerja
 - b. Pengelolaan Administrasi Keuangan
 - c. Penatausahaan, Pengelolaan Administrasi Barang, Urusan Rumah Tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan dinas
2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian tugas dinas yang meliputi pembinaan kesiswaan, manajemen dan kelembagaan dan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pembinaan kesiswaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
 - b. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang manajemen dan kelembagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
 - c. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
3. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian tugas dinas yang meliputi pembinaan kesiswaan, manajemen dan kelembagaan dan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pembinaan kesiswaan pendidikan dasar
 - b. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang manajemen dan kelembagaan pendidikan dasar
 - c. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang manajemen dan kelembagaan pendidikan dasar
4. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian tugas dinas meliputi pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
 - b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar

- c. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama
- 5. Bidang Pengendalian, Pelaporan dan TI mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian tugas dinas meliputi pengendalian, data, pelaporan dan teknologi informasi yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan dibidang pengendalian dan pelaporan
 - b. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di bidang data dan teknologi informasi
 - c. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan dibidang monitoring dan evaluasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI



1.6. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sampai dengan Desember 2017, memiliki Pegawai sebanyak 2555 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari pejabat Struktural yaitu 1 orang Kepala Dinas, 0 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 15 orang Kepala Sub Bagian/Seksi dan jumlah staf 183 orang dan Tenaga Fungsional (Pengawas Sekolah dan Guru) sebanyak 2451 orang.

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Dari 2352 orang pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai terbagi atas 819 laki-laki dan 1533 perempuan dengan rincian sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Gambar 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Gender

NO	JABATAN		JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
I	STRUKTURAL				
	1	KABUPATEN			0
		- ESELON II	1	0	1
		- ESELON III	4	0	4
		- ESELON IV	11	4	15
	2	KOORDINATOR KECAMATAN			
	3	UPTD SKB			
		Sub Total I	16	4	20
II	STAF				
	1	KABUPATEN	16	21	37
	2	KOORDINATOR WILAYAH	0	0	0
	3	UPTD SKB	0	0	0
	4	BUJANG	46	0	46
		- ADMINISTRASI SMP	44	24	68
		- ADMINISTRASI SD	13	19	32
		Sub Total II	119	64	183
III	FUNGSIONAL				
	1	PENGAWAS	24	6	30
	2	PENILIK		1	1
	3	PAMONG	6	1	7
	4	GURU TK		117	117
	5	GURU SD/MI	549	1093	1642
	6	GURU SMP	221	293	514
	7	GURU MTs		2	2
	8	GURU SMP SATAP	19	20	39
		Sub Total III	819	1533	2352
		Total	954	1601	2555

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan terdiri atas 0 orang lulusan SMP, 4 Orang lulusan SMA, 0 orang lulusan D1, 102 orang lulusan D2, 0 orang lulusan D3, 2401 orang lulusan S1 dan 48 orang lulusan S2 dengan rincian sebagai berikut:

- SD : 0 Orang
- SMP : 0 Orang
- SMA : 4 Orang
- D1 : 0 Orang
- D II : 102 Orang
- D III : 0 Orang
- S1 : 2401 Orang
- S 2 : 48 Orang

1.7. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pendidikan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah inovasi Pemetaan Pendidikan dengan pembangunan sebuah aplikasi yang disebut PETIK guna memudahkan pencarian lokasi dan titik koordinat sekolah yang dapat diakses melalui jaringan internet.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI :

Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sinjai yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renstra SKPD.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pendidikan.

Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi dan peran kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan semaksimal mungkin menghilangkan ketidakpedulian terhadap pendidikan.

Secara konseptual Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai senantiasa bermuara kepada ketercapaian mencerdaskan Sumber Daya manusia seutuhnya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Yakni “ **Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup , Terdepan dalam Pelayanann Publik** “, maka ditetapkan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai 2013-2018, yakni :

**“ TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN YANG TERDEPAN,
BERKUALITAS, BERKARAKTER, TERJANGKAU DILANDASI IMAN DAN
TAQWA ”**

Dari visi diatas dapat dijelaskan, yaitu : (1) Terwujudnya layanan Pendidikan Yang Terdepan dimaksudkan adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan pendidikan yang prima, cepat, tepat, mudah dan terbaik (2) Berkualitas dimaksudkan adalah seluruh proses pembangunan pendidikan sebagai suatu sistem, konsisten terhadap peningkatan kualitas disemua sektor kehidupan (3) Berkarakter berarti masyarakat Sinjai

memiliki kemampuan dan kematangan baik secara intelektual, spritual maupun emosional dalam membangun hubungan antar pribadi, kelompok serta mengamalkan nilai-nilai keagamaan, berakhlakul karimah serta senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap merujuk kepada kearifan lokal Kabupaten Sinjai. (4) Terjangkau dimaksudkan masyarakat Sinjai memperoleh akses layanan pendidikan dengan mudah, cepat , terjangkau dan memperkecil resiko yang memungkinkan terjadi. (5) dilandasi Iman dan Taqwa dimaksudkan bahwa sebagai ummat yang beragama semua langkah dan usaha yang dilakukan harus berlandaskan ajaran agama yang kita anut masing-masing, oleh karena yang paling tinggi derajatnya di hadapan sang pencipta adalah orang-orang yang tinggi nilai Iman dan Ketaqwaanya.

MISI:

Untuk mewujudkan visi organisasi tersebut di atas adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan Pendidikan di Kabupaten Sinjai, melalui :

1. Mewujudkan Pemerataan akses pendidikan, Peningkatan Kualitas dan Relevansi serta Manajemen Tata Kelola Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Non Formai dan Informal dan Pendidikan Kesetaraan

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, diperlukan rumusan tujuan dan sasaran yang lebih jelas agar dapat menggambarkan ukuran – ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Rumusan tersebut merupakan arah bagi sikap dan perilaku seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan nilai – nilai, amanah, profesional, kreatif, bertanggungjawab, disiplin, demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu dalam periode tahun 2013 – 2018, Dinas Pendidikan Pemda dan Olahraga menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan pada Tabel I di bawah ini :

Dari uraian Tabel 1 diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai menetapkan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Melek Huruf 2. Angka Partisipasi Kasar PAUD 3. Angka Partisipasi Kasar SD 4. Angka Partisipasi Kasar SMP 5. Angka Partisipasi Murni SD 6. Angka Partisipasi Murni SMP
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik 2. Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu 3. Angka Kelulusan Peserta Didik 4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan
		Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik yang berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase kediplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik

1 tujuan strategis dengan 3 sasaran strategis. Penjabaran waktu (miles stone) untuk target pencapaian indikator dari 3 sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Tabel II di bawah ini :

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2013	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Angka Melek Huruf	Persen	99,05	99,44	100	100	100	100
			2. Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	61,67	63,19	66,19	69,19	72,19	72,50
			3. Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	105,98	101,25	101,30	101,40	101,45	101,50
			4. Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	116,51	109,12	99,20	99,30	99,35	99,40
			5. Angka Partisipasi Murni SD	Persen	98,47	98,56	88,40	88,50	88,55	88,60
			6. Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	85,72	95,93	79,80	79,90	79,95	80,00
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik	Tenaga Pendidik	2226	2150	2100	2050	2000	1900
			2. Jumlah Siswa dan Mahasiswa	Siswa	0	162	162	162	162	162
				Mahasiswa	0	300	300	300	300	300

			yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu							
			3. Angka Kelulusan Peserta Didik	Persen	99,29	98,70	98,80	98,90	99,00	99,10
			4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah Lembaga Sekolah	66,29	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
		Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik yang berkarakter	1. Prosentase kediplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik	Siswa	0	50	40	30	20	10
				Pendidik	0	50	40	30	20	10
				Tenaga Kependidikan	0	50	40	30	20	10

Pencapaian sasaran strategis pada tabel di atas, diukur melalui indikator dimana indikator tersebut merupakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menyusunnya mengacu kepada kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta struktur eselonisasi yang dimiliki. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis seperti yang diuraikan pada tabel di atas, dan IKU tersebut mengacu pada RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018.

Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Pendidikan Dasar
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Pembebasan Biaya Sekolah

Tabel 2.3
Program untuk pencapaian sasaran tahun 2018

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	641.851.000	676.274.100
2.	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	11.008.705.000	11.083.811.000
3.	Pendidikan Non Formal	40.200.000	40.200.000
4.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	77.475.000	701.840.000
5.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	9.414.710.000	2.337.970.000
6.	Bantuan Operasional Sekolah	31.605.800.000	32.436.872.878
	TOTAL	53.961.471.020	48.359.851.598
		Penurunan	5.601.619.422
		% Penurunan	10,38%

6.2 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta rencana capaian indikator kinerja yang dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja PD. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen PD untuk mencapainya dalam tahun anggaran berjalan (Tahun 2018). Dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 ini, memuat informasi tentang (a) sasaran strategis (b) indikator kinerja dan (c) target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2018. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kelembagaan No: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Peraturan Menteri dalam Negeri No: 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja PD, maka uraian Rencana Kinerja Tahun 2018) Dinas Pendidikan seperti tabel di bawah ini :

Tabel III Penetapan Kinerja Tahun 2018
Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Angka Melek Huruf 2. Angka Partisipasi Kasar PAUD 3. Angka Partisipasi Kasar SD 4. Angka Partisipasi Kasar SMP 5. Angka Partisipasi Murni SD 6. Angka Partisipasi Murni SMP	Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 72,50 101,50 99,40 88,60 80,00
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik 2. Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu 3. Angka Kelulusan Peserta Didik 4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tenaga Pendidik Siswa Mahasiswa Persen Jumlah Lembaga Sekolah	1900 162 300 99,10 74,00
3	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik yang berkarakter	1. Prosentase kediplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik	Siswa Pendidik Tenaga Kependidikan	10 10 10

Perjanjian Kinerja

Penetapan / perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden R.I. Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sakip dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang juknis Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai menjadikan perjanjian kinerja ini sebagai dokumen penetapan kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan komitmen untuk mendukung dan melaksanakan ketercapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Renstra OPD dan RPJMD 2013 -2018. Oleh karena

itu, Penetapan Kinerja OPD Dinas Pendidikan telah diperjanjikan dengan Pemerintah Kabupaten (Bupati) selaku pemberi tugas / amanah dan Dinas Pendidikan (Kadis) selaku pengembang tugas / penanggungjawab kinerja. Disamping itu untuk mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja dengan Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai bagian pendukung kontrak kinerja dengan Bupati merupakan kesepakatan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKU dengan target yang ditetapkan dalam tahun anggaran bersangkutan. Untuk menunjang ketercapaian kinerja yang telah diperjanjikan, Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran melalui APBD Pokok tahun 2018 sebesar Rp. **53.961.471.020,-** dengan 6 program. Dalam implementasi pencapaian kinerja ini dengan kebijakan penganggaran melalui APBD-Perubahan, maka alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk menunjang ketercapaian indikator tersebut mengalami perubahan yang semula Rp. **53.961.471.020,-** menjadi Rp. **48.359.851.598,-** atau mengalami penurunan 10,38% sebagaimana Keputusan Bupati Sinjai No: 735 Tahun 2018 tertanggal 22 Oktober 2018 tentang Pengasahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2018	Unit Kerja Penanggung jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Angka Melek Huruf 2. Angka Partisipasi Kasar PAUD 3. Angka Partisipasi Kasar SD 4. Angka Partisipasi Kasar SMP 5. Angka Partisipasi Murni SD 6. Angka Partisipasi Murni SMP	Persen Persen Persen Persen Persen Persen	100 72,50 101,50 99,40 88,60 80,00	1. Sekretariat 2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal 3. Bidang Pendidikan Dasar 4. Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan 5. Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan & Teknologi Informasi
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik 2. Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu 3. Angka Kelulusan Peserta Didik 4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tenaga Pendidik Siswa Mahasiswa Persen Jumlah Lembaga Sekolah	1900 162 300 99,10 74,00	1. Sekretariat 2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal 3. Bidang Pendidikan Dasar 4. Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan 5. Bidang Pengendalian, Data, Pelaporan & Teknologi Informasi
3	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik yang berkarakter	1. Prosentase kediplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik	Siswa Pendidik Tenaga Kependidikan	10 10 10	1. Sekretariat

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	641.851.000

2.	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	11.008.705.000
3.	Pendidikan Non Formal	40.200.000
4.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	77.475.000
5.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	9.414.710.000
6.	Bantuan Operasional Sekolah	31.605.800.000
	TOTAL	53.961.471.020

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5:
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Angka Melek Huruf	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Data Statistik / Capil
		2. Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Peserta Didik (usia 0-6 tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk (Usia 0-6 tahun)}} \times 100$	Profil Pendidikan
		3. Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Peserta Didik}}{\text{Jumlah Penduduk (Usia 7-12 tahun)}} \times 100$	Profil Pendidikan
		4. Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	$\frac{\text{Jumlah Peserta Didik}}{\text{Jumlah Penduduk (Usia 13-15 tahun)}} \times 100$	Profil Pendidikan
		5. Angka Partisipasi Murni SD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Peserta Didik (usia 7-12 tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk (Usia 7-12 tahun)}} \times 100$	Profil Pendidikan
		6. Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	$\frac{\text{Jumlah Peserta Didik (usia 13-15 tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk (Usia 13-15 tahun)}} \times 100$	Profil Pendidikan
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik	Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik Yang Belum Menerima Sertifikasi Berdasarkan Syarat Tertentu	Seleksi

Formal dan Non Formal	2. Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	Siswa Mahasiswa	Jumlah Siswa/Mahasiswa yang mendapatkan Biaya Pendidikan berdasarkan syarat tertentu dan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya/Menyelesaikan Program Studi	Seleksi
	3. Angka Kelulusan Peserta Didik	Persen	Jumlah Lulusan pada tingkat satuan SD/MI dan SMP/MTs $\frac{\text{Jumlah Lulusan}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun sebelumnya}} \times 100$	Profil Pendidikan
	4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah Lembaga Sekolah	Jumlah sekolah yang sudah mendapat bantuan sarana dan prasarana $\frac{\text{Jumlah sekolah yang sudah mendapat bantuan sarana dan prasarana}}{\text{Jumlah Sekolah Keseluruhan}} \times 100$	Data DAK
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1. Prosentase kedisiplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik	Siswa Pendidik Tenaga Kependidikan	Jumlah Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disiplin $\frac{\text{Jumlah Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disiplin}}{\text{Jumlah Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar}} \times 100$	Laporan Sat Pol PP

1.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp **315.533.893.361,98** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Belanja
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	267.174.041.763,98	84,67
2	Belanja Langsung	48.359.851.598,00	15,33
Jumlah		315.533.893.361,98	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan setelah perubahan anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi persasaran Tahun Anggaran 2018

No	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	676.274.100
2.	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	11.083.811.000
3.	Pendidikan Non Formal	40.200.000
4.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	701.840.000
5.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.337.970.000
6.	Bantuan Operasional Sekolah	32.436.872.878
	TOTAL	48.359.851.598

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

3.2. ANALISI CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2018 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya > 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari sebanyak 12 indikator kinerja dari 3 sasaran, sebanyak 7 indikator dinyatakan “berhasil” karena capaiannya di atas 100% dari target, 5 indikator dinyatakan tidak berhasil karena capaiannya kurang dari target yang ditetapkan. Indikator yang tidak berhasil adalah Angka Melek Huruf, Kualifikasi Pendidikan tenaga kependidikan, Jumlah anak yang mendapatkan Bantuan pendidikan, presentase angka kelulusan peserta didik dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas Pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Pendidikan yang efektif dan efisien tersebut dalam tahun 2018 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan;
2. Meningkatnya mutu pendidikan formal dan informal;
3. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter.

Penjelasan capaian masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Pencapaian sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan diukur dari 12 indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut:

A. Analisis Capaian Indikator Kinerja

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Sinjai harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan. Untuk mengetahui peningkatan Akses layanan pendidikan, Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Informal, Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter maka dapat dilihat dari indikator sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Melek Huruf	Persen	100	96,42	96,42
		APK PAUD	Persen	72,50	97,56	134,56
		APK SD	Persen	101,50	115,84	114,13
		APK SMP	Persen	99,40	114,54	115,23
		APM SD	Persen	88,60	100	112,87
		APM SMP	Persen	80,00	100	125,00
Rata-Rata Capaian Kinerja						116,37
2	Meningkatnya mutu pendidikan formal dan informal	kualifikasi pendidikan tenaga pendidik	Tenaga Pendidik	1900	1797	94,58
		Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	Siswa	162	141	87,04
		Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	Mahasiswa	300	681	227,00
		Angka Kelulusan Peserta Didik	Persen	99,10	98,72	99,61

		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persen	74,00	76,12	102,86
Rata-Rata Capaian Kinerja						126,26
3	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter	Presentase Kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	Guru	10	0	100,00
			Pegawai	10	0	100,00
			Siswa	10	0	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja						100,00

1. Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus

Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pendidikan telah melakukan program penuntasan terhadap data base Penduduk Buta Aksara (By Name By Address) hasil pendataan tenaga lapangan Dikmas Kabupaten Sinjai Tahun 2009 sebanyak 11.787 Orang. Dari data tersebut semuanya telah dituntaskan melalui Program Penuntasan Buta Aksara sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 melalui Dana APBD II Kabupaten Sinjai, APBD I Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN hingga tuntas Melek Aksaran sebanyak 11.787 orang. Walau demikian data Buta Aksara Versi BPS sebagai data makro hasil sensus masih tersisa sebanyak 5.272 orang dan akan diadakan penelusuran / pendataan by name by address. Karena telah mencapai target yang ditetapkan maka untuk tahun 2018 sudah tidak ada lagi kegiatan untuk peningkatan Angka Melek Huruf dan yang dilaksanakan adalah kegiatan lanjutan untuk menghindari atau mencegah penduduk yang melek huruf kembali menjadi buta huruf.

Rincian data Buta Hurif berdasarkan Data BPS dapat terlihat pada tabel di bawah ini

Jumlah Penduduk Buta Aksara
Usia 15-59 Tahun

No	Kecamatan	Sisa Buta Aksara		
		L	P	Jumlah
1	Pulau Sembilan	242	283	525
2	Bulupoddo	313	299	612
3	Sinjai Barat	392	281	673
4	Sinjai Borong	600	495	1095
5	Sinjai Selatan	284	301	585
6	Sinjai Tengah	333	328	661

7	Sinjai Timur	336	311	647
8	Sinjai Utara	83	161	244
9	Tellulimpoe	365	320	685
Jumlah		2948	2779	5727

2. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD

Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari target 72,5% pada tahun 2018 menjadi 97,56% atau meningkat sebesar 25,05% pada tahun 2018 dengan presentase capaian 134,57%. Tahun 2018 jumlah Anak Usia Dini yang terdata usia 0-6 tahun sebanyak 23.093 anak, yang berusia 4-6 tahun sebanyak 12.447 anak yang berhasil ditampung atau terlayani oleh lembaga PAUD sebanyak 12.249 anak atau 97,56%. Data terlampir.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan Presentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (Berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan, yang meliputi:

a. APK SD sederajat

Perhitungan APK SD adalah jumlah siswa yang bersekolah di SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APK SD untuk tahun 2018 di targetkan 101,50% dan terealisasi 115,84% hal ini disebabkan karena adanya siswa yang belum berumur 7 tahun atau sudah berumur lebih dari 12 tahun sedang bersekolah di Sekolah Dasar. Tahun 2018 jumlah siswa yang bersekolah di SD/MI sederajat sebanyak 29.297 Siswa sedang jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 25.290 siswa sehingga mencapai presentase kenaikan sebesar 14,34% atau tingkat presentase capaian kinerja sebesar 114,13%.

b. APK SMP sederajat

Perhitungan APK SMP adalah jumlah siswa yang bersekolah di SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APK SMP untuk tahun 2018 di targetkan 99,40% dan terealisasi 114,54% hal ini disebabkan karena adanya siswa yang belum berumur 13 tahun atau sudah berumur lebih dari 15 tahun sedang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama. Tahun 2018 jumlah siswa SMP/MTs sederajat yang berhasil ditampung sebanyak 14.704 Siswa(i) sedangkan siswa 12-15 tahun

sebanyak 12.837 siswa(i) atau mengalami presentase peningkatan sebesar 15,14% dengan presentase capaian kinerja sebesar 115,23%.
Format data terlampir

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu maka APM akan mencaai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, meliputi:

a. APM SD

Perhitungan APM SD adalah jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM SD untuk tahun 2018 di targetkan 88,60% dan terealisasi 100%. Tahun 2018 jumlah siswa yang bersekolah di SD/MI sederajat usia 7-12 tahun sebanyak 25.290 Siswa sedang jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 25.290 siswa sehingga mencapai presentase 100%.

b. APM SMP

Perhitungan APM SMP adalah jumlah siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APM SMP untuk tahun 2018 di targetkan 80,00% dan terealisasi 100. Tahun 2018 jumlah siswa SMP/MTs sederajat usia 13-15 tahun yang berhasil ditampung sebanyak 12.837 Siswa(i) sedangkan siswa 12-15 tahun sebanyak 12.837 siswa(i) atau terealisasi 100%. Format terlampir

Berdasarkan data APK dan APM walaupun semua terealisasi 100 sampai diatas 100% namun tingkat pertumbuhan peserta didik mengalami penurunan setiap tahunnya.

5. Kualifikasi Pendidikan tenaga pendidik

Menurut Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, (3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar

sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dalam kenyataannya mutu guru di Indonesia sangat beragam dan rata-rata masih di bawah standar yang telah ditentukan. Banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan belum mempunyai kompetensi yang telah disyaratkan.

Dalam Undang-Undang No. 14/2005 pasal 2, disebutkan bahwa pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; meningkatkan martabat guru; dan meningkatkan profesionalisme guru. Untuk tujuan yang terakhir ini guru dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Artinya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik guru harus dapat memenuhi keinginan/harapan masyarakat dalam hal ini siswa dan orang tua; memiliki landasan pengetahuan yang kuat dan terkini khususnya dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya; dan dalam proses untuk mendapatkan profesionalisme itu hendaknya dilakukan atas dasar kompetensi individu, bukan hasil KKN.

Untuk tahun 2018 ditargetkan sebanyak 2000 guru telah memiliki sertifikat pendidik dan terealisasi sebesar 1797 guru atau hanya mencapai 94,58% dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan karena adanya peralihan kewenangan sehingga guru untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan atau sederajat sudah tidak terdata namun target yang ditetapkan adalah jumlah keseluruhan guru mulai tingkat PAUD sampai SM dan Sederajat..

6. Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu

Pemberian bantuan ini merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Sinjai bertujuan untuk memotivasi kepada peserta didik agar dapat berprestasi secara akademik dan agar peserta didik terbantu memenuhi sebagian kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dasar hukum dari program ini adalah Amendemen UUD 1945 pasal 30 ayat (4) “ pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran pendidikan” dan selanjutnya dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 11 ayat (1) “ pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa deskriminasi”.

Dalam tahun 2018 Tabungan Pendidikan diperuntukkan untuk 54 gugus dengan jumlah penerima sebanyak 162 siswa/i berprestasi dan

teralisasi sebanyak 141 siswa/i atau sebanyak 47 gugus sehingga mencapai 87,04% hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan atau sederajat telah beralih ke Provinsi dan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

7. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu

Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi akhir, meningkatkan prestasi akademik mahasiswa sinjai serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain, mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan dan meningkatkan akses keterjangkauan dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi sasaran pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa sinjai yang akan menyelesaikan studinya dan memiliki prestasi akademik pada setiap Program Studi di Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2018 ditargetkan jumlah mahasiswa yang memperoleh bantuan sebanyak 300 orang dan terealisasi sebanyak 681 orang Sehingga realisasi sebesar 227% jumlah ini adalah keseluruhan penerima Beasiswa yang menerima ditahun 2017 dan dibayarkan pada tahun anggaran 2018 jadi sudah tidak ada penambahan kuota sisa membayar kuota yang belum terbayar ditahun 2017.

8. Angka kelulusan peserta didik

Angka kelulusan peserta didik merupakan puncak pencapaian keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional yang diselenggarakan setiap tahun pelajaran yang merupakan implementasi fungsi manajemen dari segi evaluasi. Bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam Peraturan Pemerintah No: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa “ **Ujian Nasional mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan dan atau program pendidikan.**”

Berdasarkan pengelolaan nilai / hasil yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemendikbud, bahwa tahun pelajaran 2016/2017, angka kelulusan ujian nasional (UN) tahun 2018 untuk tingkat SD/MI ditargetkan mencapai 100%, telah tercapai 98,25% atau capaian masih kurang 1,75% dan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sedang tingkat SMP/MTs ditargetkan tahun 2018 sebesar 100% terealisasi sebesar 99,19% atau masih belum mencapai target yang ditetapkan Tahun 2018 jumlah siswa Tingkat Sekolah Dasar dan sederajat pada Tingkat Tertinggi tahun sebelumnya 4.578 siswa yang mengikuti dan lulus Ujian sebanyak 4.498 siswa sedangkan untuk jumlah siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan sederajat pada Tingkat Tertinggi tahun sebelumnya 4.330 siswa yang mengikuti dan lulus Ujian sebanyak 4.295 siswa atau secara keseluruhan baru

mencapai 99,19%. Dengan capaian target rata-rata 98,72% Data terlampir

9. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan

Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan **belajar**/kelas, alat-alat atau **media** pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/**prasarana** adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun/taman sekolah, jalan menuju ke sekolah.

Fasilitas **pendidikan** pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (site, building, equipment, and furniture). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, (4) Penyimpanan, (5) Penataan, (6) Penggunaan, (7) Pemeliharaan, dan (8) Penghapusan.

Jadi, secara umum **sarana dan prasarana** adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Standar **sarana dan prasarana pendidikan** telah diatur dalam PP No.32 tahun 2013 dikatakan Standar **Sarana dan Prasarana** adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 74% dan terealisasi sebesar 76,12% atau terealisasi sebesar 102,86%.

10. Presentase kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik
Kedisiplinan merupakan salah satu faktor keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru, Murid dan Tenaga Kependidikan yang disiplin akan membawa dampak positif bagi perkembangan pembelajaran, maka diperlukan dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi. Seorang guru dituntut untuk bisa mempengaruhi mengolah pola pikir, memiliki wawasan yang luas, juga harus memiliki kompetensi yang mumpuni, baik ilmu kependidikan, metodologi, atau disiplin ilmu yang akan diajarkannya

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sinjai ikut ambil peran melakukan penegakan disiplin di kalangan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan siswa tingkat satuan pendidikan

Untuk tahun 2018 ditargetkan jumlah siswa pendidik dan tenaga kependidikan yang terjangkau satpol PP sebanyak guru 10 orang, tenaga kependidikan 10 orang dan siswa 10 orang namun berdasarkan hasil dari kegiatan tahun lalu sudah tidak terdapat lagi pelanggaran disiplin maka

ditahun 2018 tidak ada lagi kegiatan yang mendukung indikator ini karena tingkat kedisiplinan yang berkarakter mencapai 100% ditahun sebelumnya.

B. Analisis Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Melek Huruf	99,44	93,47	100	100	96,42
APK PAUD	63,19	91,51	92	96,52	97,56
APK SD	101,25	105,63	105,83	113,98	115,84
APK SMP	109,12	109,04	103,86	115,35	114,54
APM SD	98,56	87,99	100	100	100
APM SMP	95,93	79,84	98	100	100
kualifikasi pendidikan tenaga pendidik	1943	2130	2202	1797	1797
Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	162	162	162	141	141
Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	75	458	679	344	681
Angka Kelulusan Peserta Didik	98,70	99,30	99,36	98,50	98,72
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	66,29	73,84	80,66	76,12	76,12
Prosentase Kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	70	65	55	0	0

1. Angka Melek Huruf

Penduduk buta aksara berdasarkan tingkat usia tahun 2009 by name bay address sebanyak 11.787 orang data ini akan dituntaskan hingga tahun 2018 sehingga sinjai bebas buta aksara tahun 2018 target 2018 ternyata tercapai di tahun 2015 sehingga jumlah penduduk buta aksara yang telah terdata telah melek huruf 100% ditahun 2015 sehingga kegiatan penuntasan buta aksara di tahun 2017 sudah tidak dilaksanakan karena telah mencapai target. Namun ada ketidaksesuaian antara data yang ada pada Dinas Pendidikan dan Statistik sehingga ditahun 2018 terdata kembali jumlah penduduk buta aksara sebanyak 5727 orang atau sekitar 3,81% dari jumlah

penduduk usia 15-59 tahun format Data terampir

2. APK PAUD

Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan berdasarkan tabel diatas tahun 2014 mencapai 63,19% meningkat menjadi 97,56% ditahun 2018 hal ini adalah bukti nyata peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini.

3. APK SD

Angka Partisipasi Kasar untuk SD meningkat secara signifikan hal ini terlihat dari presentase tahun 2014 APK mencapai 101,25% meingkat menjadi 115,84% ditahun 2018.

4. APK SMP

Angka Partisipasi Kasar untuk SMP meningkat secara signifikan hal ini terlihat dari presentase tahun 2014 APK mencapai 109,12% meingkat menjadi 115,35% ditahun 2017 namun ditahun 2018 menurun menjadi 114,54% walau demikian presentase target tetap terpenuhi.

5. APM SD

Peningkatan Angka Partisipasi Murni untuk SD sederajat dari tahun 2014 98,56% dan ditahun 2018 menjadi 100% hal ini bukti bahwa semua anak usia 7-12 tahun telah tertampung malah lebih disebabkan adanya dari daerah lain namun yang terdata hanya siswa yang murni.

6. APM SMP

Peningkatan Angka Partisipasi Murni untuk SMP sederajat dari tahun 2014 95,93% dan ditahun 2018 menjadi 100% hal ini bukti bahwa semua anak usia 13-15 tahun telah tertampung malah lebih disebabkan adanya dari daerah lain namun yang terdata hanya siswa yang murni.

7. Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik

Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik tahun 2014 jumlah guru yang telah bersertifikasi sebanyak 1943 guru jumlah ini meningkat dari tahun ketahun hingga tahun 2018 telah mencapai 1797 guru dari data antara 2017 dan 2018 sama karena jumlah penambahan tidak ada ditahun 2018. Dari data diatas terlihat ada penurunan hal ini disebabkan karna peralihan kewenangan sehingga SMA sederajat beralih menjadi kewenangan provinsi.

8. Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu

Guna peningkatan mutu lulusan pemerintah Kabupaten Sinjai melaksanakan kegiatan guna memberikan bantuan dana pendidikan kepada siswa siswi yang berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Setiap tahunnya telah ditargetkan penerima sebanyak 162 siswa(i) berprestasi mendapatkan bantuan. Pada tahun 2018 hanya 141 siswa(i) yang mendapatkan dikarenakan peralihan wewenang sehingga SMA sederajat beralih ke Provinsi.

9. Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu

Sebagai wujud perhatian pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap para mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi pendidikannya maka pemerintah melaksanakan kegiatan yang membantu mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya. Kegiatan ini mendapat sambutan positif terbukti dari membludaknya jumlah penerima bantuan yang ditargetkan

setiap tahun hanya 300 Mahasiswa(i) namun realisasinya ditahun 2018 mencapai 681 Mahasiswa(I).

10. Angka kelulusan Peserta Didik
Angka kelulusan peserta didik merupakan puncak pencapaian keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional yang diselenggarakan setiap tahun pelajaran yang merupakan implementasi fungsi manajemen dari segi evaluasi. Angka kelulusan peserta didik dari tahun ketahun mengalami pasang surut tahun 2014 angka kelulusan mencapai 98,70 dan ditahun 2018 hanya mencapai 98,72 persen hal ini dikarenakan adanya siswa yang masih terdata namun tidak mengikuti ujian.
11. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Guna peningkatan kualitas pendidikan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan bila dibandingkan tahun 2014 presentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan meningkat dari 66,29% ditahun 2018 menjadi 76,12% adapun perbedaan presentase yang lebih rendah dari tahun 2016 dikarenakan adanya peralihan wewenang untuk tingkat SMA sederajat.
12. Prosentase Kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik
Tingkat kedisiplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik dari tahun 2014 meningkat secara signifikan ditahun 2014 jumlah pelanggaran untuk peserta didik yang terjaring Satpol PP sebanyak 70 Kasus dan menurun terus hingga ditahun 2017 tidak terdapat lagi pelanggaran baik itu pendidik, tenaga Pendidikan maupun peserta didik sehingga pada tahun 2018 tidak ada lagi kegiatan yang mendukung program ini.

C. Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Angka Melek Huruf	Persen	100	96,42	96,42
2	APK PAUD	Persen	72,5	97,56	134,56
3	APK SD	Persen	101,5	115,84	114,13
4	APK SMP	Persen	99,4	114,54	115,23
5	APM SD	Persen	88,6	100	112,87
6	APM SMP	Persen	80	100	125,00
7	kualifikasi pendidikan tenaga pendidik	Pendidik	1900	1797	116,37
8	Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	siswa	162	141	94,58

9	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	mahasiswa	300	681	87,04
10	Angka Kelulusan Peserta Didik	Persen	99,1	98,72	227,00
11	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persen	74	76,12	99,61
	Prosentase Kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	Guru	10	0	100,00
		Pegawai	10	0	100,00
		Siswa	10	0	100,00

Berdasarkan tabel diatas sudah terlihat beberapa indikator telah mencapai target diantaranya APK Paud sudah melebihi target yang ditetapkan, APK juga telah melebihi target begitu juga APM, jumlah mahasiswa yang menerima bantuan, pemenuhan sarana dan prasarana dan tingkat kedisiplinan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.

1. Respon positif dari masyarakat dalam menanggapi program-program pemerintah dibidang pendidikan utamanya Program Pembebasan Biaya Pendidikan sehingga animo masyarakat untuk bersekolah semakin meningkat
2. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa
3. Pengawasan Manajemen pembangunan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis hal ini terlihat dari penggunaan dana yang efektif dan efisien dengan hasil yang maksimal
4. Adanya kebulatan tekad Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan Layanan Pendidikan Untuk melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun melalui program Pendidikan Gratis. Selain itu adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap lulusan pendidikan menengah agar tidak terjadi drop out maka berupaya mendorong angka melanjutkan untuk ke Perguruan Tinggi dengan memberikan Tabungan Siswa Berprestasi ditahun pelajaran akademik baru dan pemberian beasiswa berprestasi kepada mahasiswa. Perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui program Pendidikan Gratis didasari dari amanat Undang – Undang Dasar 1945 pada Amandemen ke 4;
 - a. Pasal 30 ayat (4) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyediakan anggaran pendidikan.
 - b. Pasal 31 ayat (1) ”Pendidikan merupakan hak warga negara Indonesia”
 - c. Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan beberapa pasal antara lain:
 - a. Pasal 5 ayat (1), “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pada ayat (5) menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”

- b. Pasal 6 ayat (1) “ setiap warga negara yang berusia 7 s.d. 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”
5. Pengoptimalan sumberdaya yang ada utamanya sumberdaya manusia dengan pola pemberdayaan untuk melakukan analisis, pemetaan, validasi dan sebagainya. Dalam upaya mengoptimalkan sumberdaya tersebut diusahakan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. dengan prinsip penghematan, efisiensi dan efektivitas serta penyusunan jadwal yang tepat, ketat dan simultan dan atau berkesinambungan.
 6. Pelaksanaan monitoring yang kontinyu sebagai upaya untuk melihat kesesuaian rencana dan pelaksanaan. Dalam monitoring ini dapat dilakukan dalam dua cara masing – masing monitoring langsung yaitu melakukan kunjungan dengan obyek kegiatan, rapat – rapat berkala dan monitoring tidak langsung yaitu mempelajari laporan – laporan yang disampaikan baik laporan bulanan, triwulan dan tahunan. Hasil monitoring dilakukan dengan evaluasi sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dimasa datang
 7. Semakin optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang tercapainya pelaksanaan program-program pendidikan serta makin baiknya kondisi infrastruktur yang menjadi motor penggerak utama kelancaran aktifitas pendidikan

Walau demikian ada pula beberapa indikator yang belum mencapai target yaitu Angka Melek Huruf, Kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan baru, Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu, Angka Kelulusan Peserta Didik hal ini disebabkan

1. Tidak adanya data Riil terkait jumlah penduduk yang buta aksara di kabupaten Sinjai sehingga terjadi selisih antara data Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Sinjai.
2. Adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat menjadi kewenangan provinsi.
3. Masih rendahnya kualitas dan mutu pendidik, belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sehingga kurang menarik minat siswa untuk belajar secara mandiri dan menemukan solusi dan pemecahan soal-soal pelajaran sehingga mereka hanya mengacu pada soal-soal tahun sebelumnya yang tentunya sudah kadaluarsa sehingga mempengaruhi angka kelulusan.

**PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Program SKPD Tahun 2018	Uraian					
		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3		4	5	6	7
	Pendidikan Anak Usia Dini	Input	Dana	Rp	676.274.100	674.454.100	99,73
		Output	Terlaksananya Kegiatan PAUD	Kegiatan	6	6	100
		Outcome	APK PAUD	Persen	72,50	97,56	134,56
		Capaian Rata-Rata Program 1					
2.	Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Input	Dana	Rp	11.083.811.000	11.033.372.300	99,54
		Output	Terlaksananya Kegiatan Wajar 9 Tahun	Kegiatan	11	11	100
		Outcome	APK SD	Persen	101,50	115,85	114,13
			APK SMP	Persen	99,40	114,54	115,23
Capaian Rata-Rata Program 2						114,68	
3.	Pendidikan Non Formal	Input	Dana	Rp	40.200.000	40.200.000	100
		Output	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Non	Kegiatan	1	1	100

			Formal				
		Outcome	Jumlah Buta Huruf yang dientaskan menjadi melek huruf	Persen	100	96,42	96,42
					Capaian Rata-Rata Program 3		96,42
4.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Input	Dana	Rp	701.840.000	460.809.400	65,55
		Output	Terwujudnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan	6	6	83,33
		Outcome	Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik	Guru	1900	1791	94,58
					Capaian Rata-Rata Program 4		94,58
5.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Input	Dana	Rp	2.337.970.000	2.333.570.000	99,81
		Output	Meningkatnya tata kelola manajemen pelayanan pendidikan	Kegiatan	4	4	100
		Outcome	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sekolah	74	76,12	102,86
					Capaian Rata-Rata Program 5		102,86

6.	Bantuan Operasional Sekolah	Input	Dana	Rp	32.436.872.878	30.865.889.514	95,16
		Output	Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah	Kegiatan	1	1	100
		Outcome	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	95,00	101,23	106,56
					Capaian Rata-Rata Program 6		106,56

D. Analisis Penyebab Keberhasilan

- a. Respon positif dari masyarakat dalam menanggapi program-program pemerintah dibidang pendidikan utamanya Program Pembebasan Biaya Pendidikan sehingga animo masyarakat untuk bersekolah semakin meningkat
- b. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa
- c. Pengawasan Manajemen pembangunan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis hal ini terlihat dari penggunaan dana yang efektif dan efisien dengan hasil yang maksimal
- d. Adanya kebulatan tekad Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan Layanan Pendidikan Untuk melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun melalui program Pendidikan Gratis. Selain itu adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap lulusan pendidikan menengah agar tidak terjadi drop out maka berupaya mendorong angka melanjutkan untuk ke Perguruan Tinggi dengan memberikan Tabungan Siswa Berprestasi ditahun pelajaran akademik baru dan pemberian beasiswa berprestasi kepada mahasiswa. Perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui program Pendidikan Gratis didasari dari amanat Undang – Undang Dasar 1945 pada Amandemen ke 4;
 1. Pasal 30 ayat (4) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyediakan anggaran pendidikan.
 2. Pasal 31 ayat (1) ”Pendidikan merupakan hak warga negara Indonesia”
 3. Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan beberapa pasal antara lain:
 - a. Pasal 5 ayat (1), “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pada ayat (5) menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”
 - b. Pasal 6 ayat (1) “ setiap warga negara yang berusia 7 s.d. 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”
- e. Pengoptimalan sumberdaya yang ada utamanya sumberdaya manusia dengan pola pemberdayaan untuk melakukan analisis, pemetaan, validasi dan sebagainya. Dalam upaya mengoptimalkan sumberdaya tersebut diusahakan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. dengan prinsip penghematan, efisiensi dan efektivitas serta penyusunan jadwal yang tepat, ketat dan simultan dan atau berkesinambungan.
- f. Pelaksanaan monitoring yang kontinyu sebagai upaya untuk melihat kesesuaian rencana dan pelaksanaan. Dalam monitoring ini dapat dilakukan dalam dua cara masing – masing monitoring langsung yaitu melakukan kunjungan dengan obyek kegiatan, rapat – rapat berkala dan monitoring tidak langsung yaitu mempelajari laporan – laporan

yang disampaikan baik laporan bulanan, triwulan dan tahunan. Hasil monitoring dilakukan dengan evaluasi sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dimasa datang

- g. Semakin optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang tercapainya pelaksanaan program-program pendidikan serta makin baiknya kondisi infrastruktur yang menjadi motor penggerak utama kelancaran aktifitas pendidikan.
- h. Banyaknya jumlah mahasiswa (i) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Sinjai yaitu 1083 pendaftar dan yang memenuhi syarat sebanyak 681 mahasiswa(i) dari semua perguruan tinggi
- i. Tingginya kesadaran Mahasiswa untuk segera menyelesaikan studinya dengan kriteria yang dipersyaratkan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas
- j. Bentuk dukungan masyarakat terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten Sinjai yang memberikan reward kepada mahasiswa(i) yang memiliki prestasi akademik

I. PENGHARGAAN DARI TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI TAHUN 2018

Pada tahun 2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini memperoleh beberapa penghargaan berupa:

1. Juara III dalam rangka Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan berdedikasi Tingkat Nasional ke 12 di kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atas nama **ST. FATIMAH**.
2. Juara III lomba karya nyata pengelola KB/TPA/SPS pada Kegiatan Jambore PTK PNF Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan atas nama **DESKA TRIATI,SS**

Pada tahun 2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai melalui Program Pendidikan Non Formal memperoleh beberapa penghargaan berupa:

1. Juara II lomba karya nyata instruktur kursus tata rias pengantin pada kegiatan jambore PTK PNF Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan atas nama **EMI HELMIANTI, SE**
2. Juara II lomba karya nyata instruktur kursus komputer pada kegiatan jambore PTK PNF Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan atas nama **SUKMA JAYANDI**
3. Juara II lomba karya nyata pengelola kursus dan pelatihan pada kegiatan jambore PTK PNF Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan atas nama **IRMAWATI SULTAN**
4. Juara I lomba karya nyata Tutor Paket B pada kegiatan jambore PTK PNF Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan atas nama **MINARNI UNJUNG, S.Pd**
5. Juara III lomba karya nyata pengelola taman bacaan masyarakat pada kegiatan jambore PTK PNF Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan atas nama **MARDIANA, S.Si**
6. Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Sinjai sebagai juara II Lomba

Paduan Suara Mars Keaksaraan dalam rangka Hari Aksara Internasional di Makassar

7. Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Sinjai sebagai Juara I Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dalam lomba Pameran Dalam Rangka Hari Aksara Internasional di Makassar
8. Piala diberikan kepada Kabupaten Sinjai sebagai Juara Umum Dalam Rangka Peringatan Hari Aksara internasional tingkat Nasional.

E. Analisis Penyebab Kegagalan dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Walau semua indikator telah mencapai hasil yang diharapkan namun terjadi ketidaksielarasan antara data Angka Melek Huruf pada Dinas Pendidikan dan BPS yang mana untuk versi Dinas Pendidikan Penuntasan Program untuk meningkatkan Angka Melek Huruf telah tuntas 100% sementara data BPS masih tersisa sebanyak 6.172 orang. Solusi dari ketidakcapaian ini adalah akan diadakan penelusuran ulang / pendataan ulang by name by address untuk pencocokan data.
2. Adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat menjadi kewenangan provinsi.
Solusi dari hal ini adalah diadakan perbaikan nilai indikator berdasarkan kewenangan daerah.
3. Masih rendahnya kualitas dan mutu pendidik, belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sehingga kurang menarik minat siswa untuk belajar secara mandiri dan menemukan solusi dan pemecahan soal-soal pelajaran sehingga mereka hanya mengacu pada soal-soal tahun sebelumnya yang tentunya sudah kadaluarsa sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kelulusan.
Solusi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan adalah dengan sosialisasi pengelolaan sarana dan prasarana, penyempurnaan kurikulum melalui KKG, KKS dan Pelatihan, Diklat dan Bimtek, panduan pengembangan diri, peningkatan prestasi akademik dan non akademik melalui kegiatan Kurikuler dan Ekstrakurikuler, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemerataan guru.

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja / Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan adalah sebesar Rp. **48.359.851.598,00** dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. **46.409.863.063,00** atau 95,97% dengan rata-rata capaian kinerja 100% sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,03%.

G. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Kegiatan pendukung Program ini sebanyak

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pagar Lembaga Paud
- b. BOP PAUD (DAK)
- c. Pengadaan APE PAUD
- d. Pola Pengembangan Gugus PAUD
- e. Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Apresiasi GTK PAUD

b. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan berbagai upaya terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat, kegiatan ini ditunjang sebanyak 11 Kegiatan yaitu:

- a. Lomba Kreatifitas Siswa
- b. Olimpiade Mipa SD
- c. Pelaksanaan UASBN Tingkat SD
- d. Pengembangan Gugus Tingkat SD
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK SD)
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAU SD)
- g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP)
- h. Pembinaan MGMP dan MKKS Berbasis Gugus SMP
- i. Olimpiade Sains Tingkat SMP
- j. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP
- k. Fasilitas Festival Lomba Seni Siswa SMP

c. Program Pendidikan Non Formal

Agar Masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan potensinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka peran pendidikan nonformal sangat strategis. Pendidikan Luar sekolah, atau pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapam, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya (Coombs, dalam Sudjana, 2000: 23)

Program pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan kecakapan hidup,

pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Pembentukan Karakter Peserta Didik

d. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru memegang peranan strategis terutama dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Peran dan posisi guru tidak dapat digantikan sekalipun oleh teknologi yang amat canggih. Begitu penting arti guru bagi kita, sehingga sudah selayaknya apabila kita menaruh perhatian besar terhadap keberadaan guru agar dapat berkiprah secara profesional sesuai harapan semua pihak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam konsiderannya, menjelaskan bahwa Guru profesional harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (USPN 20/2003, Bab I pasal 6). Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Program ini didukung dengan 6 kegiatan yaitu:

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen SD dan SMP
- b. Workshop Penyusunan RKA Dana BOS
- c. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
- d. Peningkatan Kompetensi Pengawas Satuan Pendidikan
- e. Bimtek Tenaga Pendidikan Persiapan Pra Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- f. Bimtek Akreditasi PAUD

e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelayanan yang menjadi produk asli dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (Publik Service), pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat baik layanan sipil maupun publik artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak dan melekat pada setiap orang baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi). Kegiatan ini didukung oleh 4 kegiatan yaitu:

- a. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan
- b. Pembinaan Dewan Pendidikan
- c. Tabungan Bagi Siswa Berprestasi

- d. Pemberian Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi
- f. Bantuan Operasional Sekolah
 BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan, melakukan evaluasi setiap tahun, menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

3.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk analisis efektifitas dan analisis anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya.

Namun demikian pada paragraf berikut ini merupakan penjelasan singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2018 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

Pagu awal belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam DPA 2018 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2018 sebesar **Rp. 53.961.471.020,00-**

Pagu tersebut dialokasikan pada 6 (enam) program wajib yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Dalam pelaksanaannya total pagu yang dialokasikan tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar **Rp. 48.359.851.598,00.**

Berikut tabel pengalokasian anggaran tahun 2018 pada 6 (enam) program wajib Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

No	PROGRAM	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp)
A	PROGRAM RUTIN		
1.	Pelayana Administrasi Perkantoran	1.032.145.520	897.194.320
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.985.000	81.985.000

3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	14.070.000	14.070.000
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.529.500	89.634.300
B	PROGRAM WAJIB		
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	641.851.000	676.274.100
2.	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	11.008.705.000	11.083.811.000
3.	Pendidikan Non Formal	40.200.000	40.200.000
4.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	77.475.000	701.840.000
5.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	9.414.710.000	2.337.970.000
6.	Bantuan Operasional Sekolah	31.605.800.000	32.436.872.878
	TOTAL	53.961.471.020,00	48.359.851.598,00

Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2018 sebesar **Rp. 48.359.851.598,-** yang tersebar ke lima bidang seperti terlihat dalam tabel diatas digunakan untuk membiayai 4 program rutin dan 6 program wajib yang terbagi dalam 42 kegiatan. Dari pagu anggaran **Rp. 48.359.851.598,-** yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar **Rp. 46.409.863.063,-** sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sampai Desember 2018 adalah sebesar **95,97%**.

Berikut realisasi kinerja keuangan pada 6 (enam) program wajib dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD.

Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Program Pendidikan Anak Usia Dini untuk tahun 2018, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang *Sangat Tinggi*, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 134,56 % dari target, target tahun 2018 adalah 72,50% dan realisasi sebesar 97,57%. Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya dipengaruhi oleh Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh

potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Pagar Lembaga PAUD.

Gambaran umum mengenai keluaran (output) kegiatan dan volume yang akan dilaksanakan dan dicapai adalah bahwa bangunan ruang kelas dan pagar untuk lembaga PAUD sangat dibutuhkan untuk kenyamanan proses belajar serta menjaga keamanan lingkungan sekolah, baik keamanan anak didik dari ancaman kendaraan begitu pula dengan keamanan asset sekolah khususnya bangunan dan asset yang ada diluar ruangan seperti APE luar, dengan adanya dana bantuan pembangunan RKB dan pagar, maka ada 4 lembaga PAUD yang diprioritaskan telah mendapatkan rehabilitasi dan sepanjang 117 meter pagar dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan dan terealisasi 100%. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp. 346.970.000 terealisasi sebesar Rp. 345.250.000,- atau sebesar 99,50% sisa dana sebesar Rp. 1.720.000,- adalah hasil penawaran dengan pihak ketiga.

b. BOP PAUD (DAK)

Pelaksanaan kegiatan BOP PAUD bertujuan untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang diberikan kepada satuan PAUD dan satuan pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan Program PAUD. Sasaran kegiatan ini adalah Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta memiliki peserta didik yang terdata pada DAPODIK PAUD dan PNF dengan jumlah sasaran 10.027 anak dan anak yang terdata pada DAPODIK sebanyak 9.489 anak. Waktu pelaksanaan BOP PAUD (DAK) selama 12 bulan. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan realisasi fisik 100%. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 163.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 163.800.000,- atau 100%.

c. Pengadaan APE PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan untuk peningkatan mutu pendidikan adalah Pengadaan APE PAUD yang bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak usia 0-6 tahun.

Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali kegiatan dengan jumlah penerima sebanyak 20 Lembaga PAUD dengan realisasi kegiatan 100%. Dana yang dialokasikan pada kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp/ 39.900.000,- atau 99,75% sisa dana sebesar Rp. 100.000,- adalah Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ketiga yang disesuaikan

dengan kebutuhan real cost (efisiensi anggaran).

d. Pengembangan gugus PAUD

Pengembangan Gugus PAUD diharapkan mampu meramu kegiatan pembelajaran lewat jalinan komunikasi yang baik antar komponen sekolah untuk melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran salah satunya adalah lahirnya pendidik PAUD yang memiliki kemampuan dalam menjabarkan Kurikulum PAUD 2013. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru PAUD melalui pengembangan/pemberdayaan gugus di tingkat PAUD. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan yang diikuti 198 orang tenaga pendidik PAUD dari 55 Gugus PAUD dan terealisasi 100%. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp. 68.048.100,- terealisasi sebesar Rp. 68.048.100,- atau 100%

e. Gebyar Pendidikan Anak Usia dini

Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini adalah kegiatan yang menunjang pengembangan bakat dan kreatifitas peserta didik sesuai dengan rentang usia yaitu dengan melakukan kegiatan gebyar sebagai wadah untuk menampilkan ataupun melombakan kemampuan anak sehingga dapat memotivasi dan merangsang tumbuh kembang anak. Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari 9 kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 162 anak dengan 6 jenis kegiatan lomba. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebanyak 22.981.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.981.000,- atau 100% hasil yang dicapai adalah berkembangnya bakat dan kreatifitas anak sesuai rentang usianya tercapai 65% dengan realisasi 100%

f. Apresiasi GTK PAUD

Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD merupakan upaya pemerintah dalam memberikan penghargaan dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD atas pengabdian, dedikasi, dan prestasi mereka dalam meningkatkan kualitas PAUD sekaligus memotivasi PTK untuk berkarya, berinovasi dan berprestasi dalam tugasnya. Kegiatan ini diikuti oleh 99 orang yang diseleksi terpilih 13 orang mengikuti sampai tingkat nasional dengan capaian prestasi sesuai dengan target yaitu masuk 5 besar dan berhasil mencapai peringkat III nasional. Jumlah dana untuk kegiatan ini adalah Rp. 34.475.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.475.000,- atau 100%.

b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan berbagai upaya terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Program ini didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan yaitu:

1. **Lomba Kreatifitas Siswa**
Lomba Kreatifitas Siswa adalah kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 99 siswa pada 10 Hari besar nasional dengan capaian realisasi fisik 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.980.000,- atau 86,17% sisa dana yang tidak dicairkan Rp. 1.120.000,- adalah sisa belanja perjalanan dinas luar daerah yang telah disesuaikan dengan real cost.
2. **Olimpiade MIPA**
Olimpiade MIPA bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing siswa di bidang Sains kegiatan ini diikuti oleh 54 siswa dan masuk dalam 10 besar tingkat provinsi dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.305.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.305.000,- atau 100%.
3. **Penembangan Gugus Tingkat SD**
Peningkatan kemampuan guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan salah satu kegiatan peningkatan mutu pendidikan sehingga mampu memberikan kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga melahirkan inovasi pembelajaran yang akan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kegiatan ini diikuti oleh 33 gugus SD sehingga realisasi kegiatan berjalan 100% dengan dana Rp. 159.556.000 dengan realisasi sebesar Rp. 142.606.000 atau 89,38% sisa dana sebesar Rp. 16.950.000,- adalah Belanja Sewa Gedung dan Belanja Makan Minum kegiatan disebabkan adanya peserta yang tidak hadir.
4. **Pelaksanaan UASBN Tingkat SD**
Pelaksanaan UASBN Tingkat SD bertujuan untuk Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan Mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu waktu pelaksanaan 1 kali kegiatan dengan jumlah sekolah sebanyak 242 Sekolah Dasar dengan hasil kinerja fisik 100%. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 159.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 159.297.000,- atau 99,72% sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 453.000,- adalah sisa belanja cetak yang disesuaikan dengan rill cost.
5. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK SD)**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK SD) adalah kegiatan rutin untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang sekolah dasar dengan Output Jumlah ruang kelas yang direhab, jumlah ruang kelas baru, dan

jumlah paket buku perpustakaan dengan waktu pelaksanaan selama 6 bulan dengan total 8 sekolah rehabilitasi kelas, 2 sekolah pembangunan RKB, 12 Sekolah Pembangunan WC, 100 Sekolah Rehabilitasi WC dan 37 sekolah penerima paket buku perpustakaan. Hasil dari kegiatan tersebut telah mencapai realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.766.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.751.522.600,- atau 99,75% sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 16.950.000,- adalah sisa tender.

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar 9 Tahun (DAU SD)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAU SD) dilaksanakan selama 3 bulan untuk pembangunan 2 Sekolah Pembangunan Pagar dan 1 Sekolah Pembangunan WC dengan realisasi fisik 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 346.970.000,- terealisasi sebesar Rp. 345.146.000,- atau 99,47% sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 1.824.000,- adalah sisa dana tender.

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP) adalah kegiatan rutin untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang sekolah menengah pertama dengan Output 7 Sekolah Pengadaan Mobiler Ruang Kelas, 3 Sekolah pengadaan mobiler Ruang Lab. IPA, 5 Sekolah pengadaan Alat-alat Lab, 7 sekolah rehabilitasi, 3 sekolah pembangunan Laboratorium, dan 6 sekolah pembangunan WC dengan waktu pelaksanaan selama 6 bulan. Hasil dari kegiatan tersebut telah mencapai realisasi fisik 100%. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.417.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.411.547.000,- atau 99,88% sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 5.453.000,- adalah sisa tender.

8. Pembinaan MGMP dan MKKS berbasis Gugus SMP

Pembinaan MGMP dan MKKS berbasis Gugus SMP adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SMP dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan kegiatan ini dilaksanakan 1 kali kegiatan dengan membahas 10 Mata Pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 82.800.000,- dan terealisasi 100%. (Rp 82.800.000,-)

9. Olimpiade Sains Tingkat SMP

Olimpiade Sains Tingkat SMP adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing siswa tingkat SMP dengan realisasi fisik sebesar 100% kegiatan yang dilakukan selama 1 bulan yang

diikuti oleh 288 Siswa/i. Walau belum mengukir prestasi namun telah berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.722.500,- terealisasi sebesar Rp. 13.921.200,- atau 88,54% sisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 1.801.300,- adalah belanja jasa kantor dan belanja cetak yang direalisasikan berdasarkan real cost.

10. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SD dan SMP
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat SD dan SMP bertujuan untuk membina prestasi siswa di bidang olahraga yang diikuti oleh 242 Sekolah Dasar dan 43 Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi kegiatan 100%. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 85.265.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 85.265.000,- atau 100%.
11. Fasilitasi Festival Lomba Seni Siswa SMP
Fasilitasi Festival Lomba Seni Siswa SMP adalah kegiatan yang bertujuan untuk Meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik untuk mengespresikan diri melalui kegiatan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya dengan realisasi kegiatan 100%. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 36.342.500,- dan realisasi sebesar Rp. 27.982.500,- atau 77,00% sisa dana sebesar Rp. 8.360.000,- adalah belanja jasa kantor yang terdiri dari Belanja jasa transportasi dan Belanja Kontribusi yang diperuntukkan untuk juara hingga Tingkat Nasional namun terealisasi hanya sampai tingkat Provinsi.

c. Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal adalah pendidikan yang konsep dari pendidikan seumur hidup dimana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal saja. Pendidikan Non Formal merupakan komunikasi yang teratur dan terarah diluar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan dengan tujuan meningkatkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi manusia yang efektif dan efisien dalam lingkungan keluarga dan negara. Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu:

1. Pembentukan Karakter Peserta Didik

Pembentukan karakter Peserta Didik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menumbuhkan karakter yang merupakan kualitas individu atau kolektif yang menjadi Penilaian, Budi Pekerti, Moral dan watak yang bertujuan membangun kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.200.000 atau realisasi 100%.

d. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang mana dalam hal ini Indonesia masih rendah dalam hal mutu pendidik dan tenaga kependidikan untuk itu diadakan berbagai upaya dalam rangka peningkatan mutu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Prosentase Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam proses Pembelajaran. Kegiatan ini ditargetkan 85% dengan realisasi 85% atau terlaksana 100% berdasarkan target. Program ini didukung oleh 6 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen SD dan SMP

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan. Pelaksanaan pemeriksaan Dokumen SD dan SMP merupakan kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme bagi Guru yang bertujuan untuk memaksimalkan proses belajar mengajar disekolah dan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan sekolah sasaran pelaksanaan kegiatan adalah tingkat satuan pendidikan SD dan SMP yang terdiri dari 284 dokumen yang terbagi 242 dokumen Sekolah Dasar dan 42 Dokumen Sekolah Menengah Pertama. Pelaksanaan kegiatan terlaksana 100% dengan anggaran sebesar Rp. 31.080.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.775.000,- atau 99,02% sisa dana Rp. 305.000,- adalah belanja Alat Tulis Kantor tidak terealisasi karena adanya kesalahan Item yang akan dibelanjakan.

2. Workshop Penyusunan RKA Dana BOS

RKA dana BOS adalah suatu kegiatan perencanaan kerja terkait dengan belanja sekolah sesuai dengan anggaran masing-masing sekolah. Workshop Penyusunan RKA Dana BOS dilaksanakan berkaitan dengan peningkatan kompetensi pengelola dana BOS dalam memanager dana yang masuk ke sekolah. Kegiatan ini terlaksana 100% yang mana peserta terdiri dari para Bendahara pengelola Dana BOS tingkat SD dan SMP sebanyak 282 orang dengan hasil tingkat pemahaman meningkat 80%. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 51.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.999.900,- atau 51,95% sisa dana sebesar Rp. 24.975.100,- adalah Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan hal ini disebabkan karena rencana akan diundang semua sekolah namun ternyata realisasi hanya mengundang sampel 100 sekolah jadi dana tidak diambil hanya dicairkan berdasarkan kebutuhan dengan realisasi kegiatan 100%.

3. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi disekolah merupakan faktor penyumbang keberhasilan upaya penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik untuk itu dalam upaya

peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang tugas pokok dan fungsi sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala SD sebanyak 53 orang dan Kepala SMP sebanyak 27 Orang dengan hasil 85% dengan realisasi kegiatan 100%. Jumlah dana yang diberikan sebanyak Rp. 200.437.000,- terealisasi sebesar Rp. 200.437.000,- atau 100%.

4. Peningkatan Kompetensi Pengawas Satuan Pendidikan
Kegiatan ini tidak terlaksana karena sudah dilaksanakan di tingkat Provinsi
5. Bimtek Tenaga Pendidikan Persiapan Pra Pendidikan Profesi Guru
Peningkatan mutu pendidikan merupakan agenda penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu sorotan terhadap rendahnya mutu pendidikan sebagiannya dikaitkan dengan profesionalisme guru. Tujuan dari pelaksanaan Bimtek ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru jenjang PAUD, SD dan SMP dalam menghadapi pendidikan profesi guru dalam jabatan agar kualitas lulusan calon guru dalam jabatan meningkat sehingga meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Profesi Guru. Kegiatan diikuti oleh 421 Guru dengan harapan peningkatan pengetahuan meningkat 80% dan realisasi pelaksanaan kegiatan 100%. Jumlah dana yang dialokasikan sebanyak Rp. 207.066.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 207.066.500 atau 100%
6. Bimtek Akreditasi PAUD
Akreditasi adalah kegiatan pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh lembaga akreditasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan. Untuk mempercepat proses pembinaan dan pendampingan maka dilaksanakan Bimbingan Teknis Akreditasi PAUD sehingga pengelola atau penyelenggara atau tenaga pendidik memahami persiapan mengenai dokumen 8 Standar Nasional Pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan diikuti oleh 100 orang dengan hasil meningkatnya kompetensi tenaga pendidik PAUD sebesar 85% dan realisasi kegiatan 100%. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 58.390.000,- dengan realisasi 100% atau

Rp. 58.390.000,-

e. Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Program ini terealisasi secara fisik 100% dengan 4 kegiatan pendukung.

1. Pembinaan Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten. maka Dewan Pendidikan perlu diberdayakan untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Pelaksanaan kegiatan Dewan Pendidikan selama 12 bulan pelaksanaan kegiatan ini terealisasi 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 103.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 103.000.000,- atau 100%.

2. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dilaksanakan Untuk mewujudkan akuntabilitas dibutuhkan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan satu kegiatan dengan 785 sekolah yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi, laporan hasil monev dan kegiatan ini telah terealisasi 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 61.470.000 dengan realisasi Rp. 60.070.000,- atau 97,72%, sisa dana Rp. 1.400.000,- adalah belanja jasa transportasi yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas namun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 492 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Perjalanan Dinas maka tidak dibayarkan.

3. Tabungan Siswa Berprestasi

Pemberian Tabungan kepada Peserta didik Berprestasi Tingkat SD / MI, SMP / MTs bertujuan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Gratis yang berkualitas, perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi, holistik melalui suatu sistem pembiayaan yang jelas dan tepat sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan dengan total penerima sebanyak 141 siswa sehingga realisasi fisik terlaksanan 100%. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 130.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 130.500.000,- atau 100%.

4. Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi

Pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa(i) Sinjai serta motivasi berprestasi bagi

mahasiswa(i) lain untuk mengurangi jumlah mahasiswa(i) yang putus kuliah karena tidak mampu. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan dengan target jumlah penerima sebanyak 300 terealisasi 681 orang atau terealisasi 227%. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.043.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.043.000.000,- atau 100% kegiatan ini mencapai lonjakan realisasi disebabkan karena jumlah pendaftar yang memenuhi syarat melebihi target dan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk membayarkan kelebihan tersebut.

f. Bantuan Operasional Sekolah

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personil sekolah, membebaskan pungutan biaya operasional sekolah bagi peserta didik tingkat SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan meringankan beban biaya operasional peserta didik yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu yang diselenggarakan oleh masyarakat. Program ini terdiri atas 1 kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah adalah Bantuan yang disediakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pendidikan yang dialokasikan kepada satuan pendidikan yang terdata dalam DAPODIK dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini dialokasikan ke 239 SD Negeri dan 2 SD Swasta, 40 SMP Negeri dan 1 SMP Swasta dengan realisasi pelaksanaan kegiatan 100%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 32.436.872.878,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.865.889.514,00 atau sebesar 95,16% Sisa dana sebesar Rp. 1.570.983.364,00 merupakan silva.

Tabel 3.5
pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS RKPD	INDIKATOR KINERJA	2018			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN					
		TARGET	REALISASI	% REALISASI		TARGET	REALISASI	% REALISASI			
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	Angka Melek Huruf	100	96,42	96,42	I	Pendidikan Anak Usia Dini	676.274.100,00	674.454.100,00	99,73
		2	Angka Partisipasi Kasar PAUD	72,5	97,56	134,56	1.	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas dan pagar lembaga PAUD	346.970.000,00	345.250.000,00	99,50
		3	APK SD	101,5	115,84	114,13	2.	BOP PAUD (DAK)	163.800.000,00	163.800.000,00	100
		4	APK SMP	99,4	114,54	115,23	3.	Pengadaan APE PAUD	40.000.000	39.900.000	99,75
		5	APM SD	88,6	100	112,87	4.	Pola pengembangan Gugus PAUD	68.048.100	68.048.100	100,00
		6	APM SMP	80	100	125,00	5.	Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini	22.981.000	22.981.000	100,00
							6.	Apresiasi GTK PAUD	34.475.000	34.475.000	100
							II	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	11.083.811.000,00	11.033.372.300,00	99,54
							1.	Lomba Kreatifitas Siswa	8.100.000,00	6.980.000,00	86,17

							2.	Olimpiade Mipa SD	6.305.000,00	6.305.000,00	100,00
							3.	Pelaksanaan UASBN Tingkat SD	159.750.000,00	159.297.000,00	99,72
							4.	Pengembangan gugus tingkat SD	159.556.000,00	142.606.000,00	89,38
							5.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar (DAK SD)	5.766.000.000,00	5.751.522.600,00	99,75
							6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar (DAU SD)	346.970.000,00	345.146.000,00	99,47
							7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP)	4.417.000.000,00	4.411.547.000,00	99,88
							8.	Pembinaan MGMP dan MKKS berbasis guru SMP	82.800.000,00	82.800.000,00	100,00
							9.	Olimpiade SAINS Tingkat SMP	15.722.500,00	13.921.200,00	88,54
							10.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP	85.265.000,00	85.265.000,00	100,00
							11.	Fasilitas Festifal Lomba Seni Siswa SMP	36.342.500,00	27.982.500,00	77,00
							III	Pendidikan Non Formal	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00

							1.	Pembentukan karakter peserta didik	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1.	Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik	1900	1797	116,37	IV	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	701.840.000,00	460.809.400,00	65,66
		2	Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	162 300	141 681	94,58 227,00	1.	Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen SD dan SMP	31.080.000,00	30.775.000,00	99,02
		3	Angka Kululusan Peserta Didik	99,1	98,72	87,04	2.	Workshop penyusunan RKA Dana BOS	51.975.000,00	26.999.900,00	51,95
		4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	74	76,12	99,61	3.	Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah	200.437.00,00	166.397.000,00	83,02
							4.	Peningkatan kompetensi pengawas satuan pendidikan	152.891.500,00	-	0,00
							5.	Bimtek tenaga pendidikan persiapan pra pendidikan profesi guru (PPG)	207.066.500,00	178.247.500,00	86,08
							6.	Bimtek akreditasi PAUD	58.390.000,00	58.390.000,00	100,00
3	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik yang berkarakter	1	Prosentase kedisiplinan pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik	10	0	100	V	Manajemen Pelayanan pendidikan	2.337.970.000,00	2.333.570.000,00	99,81

				10	0	100	1.	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan	61.470.000,00	60.070.000,00	97,72
				10	0	100	2.	Pembinaan Dewan Pendidikan	103.000.000,00	100.000.000,00	97,09
							3.	Tabungan bagi siswa berprestasi	130.500.000,00	130.500.000,00	100,00
							4.	Pemberian penghargaan kepada Mahasiswa berprestasi	2.043.000.000,00	2.043.000.000,00	100,00
							VI	Bantuan Operasional Sekolah	32.436.862.878	30.865.889.514,00	95,16
							1.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	32.436.862.878	30.865.889.514,00	95,16
								JUMLAH	48.359.851.598,00	46.409.863.063,00	95,97

Analisis Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk Program yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Terlihat bahwa dari 6 Program Wajib dengan 29 kegiatan telah mencapai kinerja 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96,61%, kegiatan yang menunjukkan pencapaian 100%.

Program dan kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS RKPD		INDIKATOR KINERJA		% REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENS I	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	Angka Melek Huruf	96,42	I Pendidikan Anak Usia Dini	99,73	0,27	
		2	Angka Partisipasi Kasar PAUD	134,56	1.	Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas dan pagar lembaga PAUD	99,50	0,50
		3	APK SD	114,13	2.	BOP PAUD (DAK)	100,00	0
		4	APK SMP	115,23	3.	Pengadaan APE PAUD	99,75	0,25
		5	APM SD	112,87	4.	Pola pengembangan Gugus PAUD	100,00	0
		6	APM SMP	125,00	5.	Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini	100,00	0
					6.	Apresiasi GTK PAUD	100,00	0
					II Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	99,54	0,46	
					1.	Lomba Kreatifitas Siswa	86,17	13,83
					2.	Olimpiade Mipa SD	100,00	0
					3.	Pelaksanaan UASBN Tingkat SD	99,72	0,28

					4.	Pengembangan gugus tingkat SD	89,38	10,62
					5.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar (DAK SD)	99,75	0,25
					6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar (DAU SD)	99,47	0,53
					7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK SMP)	99,88	0,12
					8.	Pembinaan MGMP dan MKKS berbasis guru SMP	100,00	0
					9.	Olimpiade SAINS Tingkat SMP	88,54	11,46
					10.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP	100,00	0
					11.	Fasilitas Festival Lomba Seni Siswa SMP	77,00	23
					III	Pendidikan Non Formal	100,00	0
					1.	Pembentukan karakter peserta didik	100,00	0
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal	1.	Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik	116,37	IV	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	65,66	34,34
		2	Jumlah Siswa dan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu	94,58 227,00	1.	Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen SD dan SMP	99,02	0,98
		3	Angka Kululusan Peserta Didik	87,04	2.	Workshop penyusunan RKA Dana BOS	51,95	48,05
		4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	99,61	3.	Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah	83,02	16,98
					4.	Peningkatan kompetensi pengawas satuan pendidikan	0,00	100
					5.	Bimtek tenaga pendidikan persiapan pra pendidikan profesi guru (PPG)	86,08	13,92

					6.	Bimtek akreditasi PAUD	100,00	0
3	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik yang berkarakter	1	Prosentase kedisiplinan pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik	100	V	Manajemen Pelayanan pendidikan	99,81	0,19
				100	1.	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan	97,72	2,28
				100	2.	Pembinaan Dewan Pendidikan	97,09	2,91
					3.	Tabungan bagi siswa berprestasi	100,00	0
					4.	Pemberian penghargaan kepada Mahasiswa berprestasi	100,00	0
					VI	Bantuan Operasional Sekolah	95,16	4,84
					1.	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	95,16	4,84
						JUMLAH	95,97	4,03

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2018 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya > 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari sebanyak 12 indikator kinerja dari 3 sasaran, sebanyak 7 indikator dinyatakan “berhasil” karena capaiannya di atas 100% dari target, 5 indikator dinyatakan tidak berhasil karena capaiannya kurang dari target yang ditetapkan. Indikator yang tidak berhasil adalah Angka Melek Huruf, Kualifikasi Pendidikan tenaga kependidikan, Jumlah anak yang mendapatkan Bantuan pendidikan, presentase angka kelulusan peserta didik dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Evaluasi dan analisa capaian kinerja Dinas Pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Pendidikan yang efektif dan efisien tersebut dalam tahun 2018 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan;
2. Meningkatnya mutu pendidikan formal dan informal;
3. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Walau semua indikator telah mencapai hasil yang diharapkan namun terjadi ketidakselarasan antara data Angka Melek Huruf pada Dinas Pendidikan dan BPS yang mana untuk versi Dinas Pendidikan Penuntasan Program untuk meningkatkan Angka Melek Huruf telah tuntas 100% sementara data BPS masih tersisa sebanyak 6.172 orang. Solusi dari ketidakcapaian ini adalah akan diadakan penelusuran ulang / pendataan ulang by name by address untuk pencocokan data.

Adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat menjadi kewenangan provinsi. Solusi dari hal ini adalah diadakan perbaikan nilai indikator berdasarkan kewenangan daerah.

Masih rendahnya kualitas dan mutu pendidik, belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran sehingga kurang menarik minat siswa untuk belajar secara mandiri dan menemukan solusi dan pemecahan soal-soal pelajaran sehingga mereka hanya mengacu pada soal-soal tahun sebelumnya yang tentunya sudah kadaluarsa sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kelulusan. Solusi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan adalah dengan sosialisasi pengelolaan sarana dan prasarana, penyempurnaan kurikulum melalui KKG, KKS dan

Pelatihan, Diklat dan Bimtek, panduan pengembangan diri, peningkatan prestasi akademik dan non akademik melalui kegiatan Kurikuler dan Ekstrakurikuler, peningkatan kesejahteraan guru, dan pemerataan guru.